KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Polri: Belum Ada Tersangka Mafia Minyak Goreng
Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 7

Polri: Belum Ada Tersangka Mafia Minyak Goreng

BAMBANG NOROYONO,
FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Satuan Tugas (satgas) Pangan Bareskrim Mabes Polri belum menetapkan tersangka terkait dugaan mafia minyak goreng. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Dedi Prasetyo mengatakan, dugaan keberadaan mafia minyak goreng yang ditengarai menjadi penyebab kelangkaan dan melambungnya harga di pasaran, masih sebatas informasi awal proses penyelidikan.

"Belum ada (penetapan tersangka). Sudah ditanyakan ke satgas pangan. Belum ada tersangka. Satgas akan berkoordinasi dengan mendag (menteri perdagangan)," ujar Dedi lewat pesan singkatnya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (21/3).

Pekan lalu, saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (17/3), Mendag Muhammad Lutfi menjanjikan, akan membongkar keberadaan mafia minyak goreng yang membuat harga di pasaran melambung tinggi dan langka beberapa waktu lalu. Lutfi mengeklaim, sudah mengantongi sejumlah nama mafia minyak goreng yang akan ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum pada Senin (21/3).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas), Brigjen Ahmad Ramadhan, pun memastikan belum ada penetapan tersangka mafia minyak goreng hingga Senin (21/3). Namun, menurut Ramadhan, Bareskrim Polri memastikan untuk menindaklanjuti informasi keberadaan mafia minyak goreng. "Prinsipnya, berkaitan dengan itu (mafia minyak goreng), Mabes Polri akan menindaklanjuti. Apalagi, itu atensi dari pemerintah. Pasti akan ditindaklanjuti," katanya.

Di lain pihak, Fraksi PKS di DPR RI mengusulkan panitia khusus (pansus) hak angket kelangkaan dan kemahalan minyak goreng. Namun, menurut Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, belum diperlukan. Dia mengatakan, pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk membicarakan soal neraca pangan. "Kita membahas bersama-sama pemerintah tentang neraca pangan kita seperti apa. Kalau migor kecil, ini kita bicara besar. Di situlah rapat gabungan kita laksanakan sebelum bicara pansus. Kita bicara dulu tentang neraca pangan kita seperti apa," kata Gobel.

Dia pun menyatakan, pansus adalah jalan terakhir. Yang paling penting, menurut dia, bagaimana memecahkan persoalan bersama, tidak hanya Kemendag.

Anggota Komisi VI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan juga menilai, permasalahan minyak goreng saat ini sebaiknya diselesaikan lewat forum panitia kerja (panja). Komisi VI sendiri telah merekomendasikan pembentukan Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok.

"Untuk usulan hak angket, kami pikir masih belum perlu. Karena jelas permasalahannya juga Komisi VI sudah memutuskan untuk (membentuk) panja," ujar Nasim.

Di sisi lain, menurut Nasim, salah satu penyebab langkanya minyak goreng adalah adanya pengusaha nakal, spekulan, dan mafia. Pemerintah dalam hal ini Kemendag dan aparat penegak hukum harus terlebih dahulu, mengatasi masalah tersebut dengan penegakan hukum yang tegas.

"Mendag telah melihat dan mampu membuktikan dalam mengatasi permasalahan selama ini, mengatasi persoalan ini tidak akan bisa terselesaikan apabila semua komponen tidak bersama dan tidak mau mendukung," ujar Nasim.

nawir arsyad akbar **ed:** mas alamil huda